

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Sejak zaman kemerdekaan bangsa Indonesia sudah menghadapi permasalahan ini dan sampai sekarang tetap menjadi permasalahan utama hingga saat ini. Masalah kemiskinan sangat kompleks dan beragam, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, kemiskinan merupakan masalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah negara. Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya jauh tertinggal dari masyarakat lain yang berpotensi lebih tinggi karena kemampuan mereka yang lebih lemah untuk berbisnis dan terbatasnya akses ke kegiatan ekonomi. (Sugiyana et al., 2022)

Individu ditakdirkan untuk hidup dalam kemiskinan ketika mereka kekurangan sumber daya. Ketika tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan, gizi, dan waktu luang suatu populasi rendah, hal itu menunjukkan masa ketidakberdayaan dan karenanya dianggap miskin. Rendahnya tingkat pendidikan informal merupakan akibat langsung dari kekurangan sumber daya manusia formal dan informal yang menyebabkan kemiskinan. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya oleh Supriatna (1997)

Jika kemiskinan menjadi meluas dan tidak dapat diatasi secara memadai untuk setiap orang, kemungkinan besar akan tetap menjadi masalah di negara ini. Dalam perjuangannya melawan kemiskinan, Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, menghadapi hambatan yang berat. Namun hal ini karena negara ini menghadapi tantangan serius dari meningkatnya angka kemiskinan, yang merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk dan status kelas menengah ke bawah

secara umum. Data berikut menampilkan jumlah penduduk Bekasi yang hidup dalam kemiskinan dari tahun 2012–2014 dan 2014–2018.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Data Penduduk Miskin (ribu/jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
2012	139,80	5,56
2013	137,80	5,33
2014	139,70	5,25
2015	146,94	5,46
2016	140,03	5,06
2017	136,01	4,79
2018	119,82	4,11
2019	113,65	3,81
2020	134,01	4,38
2021	144,10	4,74
2022	137,39	4,43
2023	129,40	4,10
2024	128,84	4,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi Tahun 2024

Dari pembahasan data di atas menurut Badan Pusat Statistik terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah Kota Bekasi mengalami perubahan yang kurang stabil, baik mengalami penurunan maupun peningkatan. Jumlah yang menurun dan bertambah tidak ada signifikansi yang konsisten dan data angkannya tidak berbeda signifikan antara tahun ke tahun. Berdasarkan data lima tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, namun pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan di Kota Bekasi mengalami peningkatan yang tajam dan angka kemiskinan pun meningkat, penyebab dari peningkatan kemiskinan tersebut karena adanya penyakit virus corona penyakit ini dengan cepat menyebar keseluruh dunia dan mengakibatkan pandemi COVID-19 dan dibatasinya aktivitas masyarakat.

Pada tahun 2022-2024 angka kemiskinan di Kota Bekasi mulai mengalami penurunan, walaupun jumlah penduduk miskin berkurang, tetap saja kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan program bantuan sosial yang dapat meringankan beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Program bantuan tunai bersyarat atau disebut dengan Conditional Cash Transfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara – negara di dunia.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Peraturan Menteri Sosial No. 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperbarui melalui Pemensos No. 1 tahun 2018 terkait Program Keluarga Harapan. Program PKH dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin sebagai bentuk perlindungan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan berupa uang tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Penerima bantuan PKH ditetapkan berdasarkan data BPS kemudian di validasi oleh pendamping PKH di wilayah masing-masing kemudian ditetapkan sebagai peserta PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan oleh Kementrian Sosial RI dan dijalankan di setiap daerah di Indonesia (Sugiyana et al., 2022).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang

tersedia di sekitar mereka. Untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

PKH tidak dimaksudkan sebagai kelanjutan dari program bantuan sebelumnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan untuk membantu rumah tangga miskin untuk menjaga daya beli ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun tujuan PKH untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang sampai saat ini banyak diadopsi oleh banyak negara sebagai strategi program bantuan sosial karena ciri utama dari program bantuan ini adalah memerlukan perilaku yang harus diterapkan oleh penerima bantuan dari program tersebut. (Hidayat, 2018)

Tabel 1.2 Jumlah KPM di Kota Bekasi

No.	Data pertahun	Jumlah penerima PKH di Kota Bekasi
1.	2012	7.835
2.	2013	9.827
3.	2014	9.270
4.	2015	19.086
5.	2016	24.694
6.	2017	24.326
7.	2018	38.091
8.	2019	42.354
9.	2020	40.172
10.	2021	40.618
11.	2022	36.668
12.	2023	36.705
13.	2024	36.270
14.	2025	40.300

Sumber : Arsip Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi sebesar 128.840 orang. Dinas Sosial Kota Bekasi mencatat sebanyak 40.300 orang masuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2025. Pensos Ahli Muda Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial Kota Bekasi, Bu Sasti mengatakan adanya kenaikan kurang lebih 8.000 Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2019 sampai tahun 2021, lalu pada tahun 2022 dan 2024 kembali menurun menjadi 36.270 Keluarga Penerima Manfaat di Kota Bekasi. Nur Azizah Tamhid, Anggota DPR Komisi VIII mengatakan dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bekasi memiliki tugas yaitu mendata masyarakat miskin yang memiliki anggota keluarga yang lanjut usia, penyandang stabilitas, atau penderita stunting. Para pendamping PKH diharapkan dapat bekerja secara

professional dan melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan dan mampu mengumpulkan data masyarakat miskin secara akurat sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran pada tujuan. (<https://depok.tribunnews.com>)

Tabel 1.3 Jumlah KPM PKH Kecamatan di Kota Bekasi

No,	Kecamatan	Jumlah Penerima PKH	Persentase Jumlah Penduduk
1.	Bantargebang	2.327	56,21
2.	Bekasi Barat	4.100	32,37
3.	Bekasi Selatan	2.784	23,96
4.	Bekasi Timur	4.071	36,5
5.	Bekasi Utara	5.013	28,39
6.	Jatiasih	3.888	25,98
7.	Jatisampurna	2.243	32,14
8.	Medansatria	2.767	39,28
9	Mustikajaya	3.724	36,65
10.	Pondok Gede	3.836	35,71
11.	Pondok Melati	2.876	24,55
12.	Rawalumbu	2.671	50,54

Sumber : Arsip Koordinator PKH Kota Bekasi Tahun 2025

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bekasi merupakan salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu mengurangi pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diharapkan akan memutus rantai kemiskinan. Program ini telah berlangsung selama 12 tahun di Kota Bekasi dimulai dari tahun 2012 sampai saat ini. Apabila ditinjau berdasarkan tingkat kecamatan, Kecamatan Medan Satria merupakan salah satu wilayah dengan jumlah KPM yang cukup besar. Berdasarkan data Koordinator PKH Kota Bekasi Tahun 2025, Kecamatan Medan Satria memiliki 2.767 KPM. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Satria termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi yang signifikan dibandingkan beberapa kecamatan lainnya.

Gambar 1.1 Data Jumlah KPM PKH Kecamatan Medan Satria Tahun 2025



KELURAHAN/DESA	JUMLAH KPM	DISYAKIL	BURUK	AJI	SD	SMP	SMA	DISABILITAS	LANSIA	HASIL	MAN
Medan Sembilan	527	0	484	44	293	141	150	17	334	0	0
Medan Sembilan	487	0	447	40	164	100	204	10	160	0	0
Medan Sembilan	327	0	297	30	211	100	100	19	307	0	0
Medan Sembilan	322	0	291	31	209	216	100	10	320	0	0
TOTAL	2.489	0	2.489	343	1.083	447	444	56	922	0	0

Sumber: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), 2025

Berdasarkan data PKH periode Januari–Maret 2025 pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), total KPM di Kecamatan Medan Satria berjumlah 2.489 keluarga. Dari empat kelurahan yang ada, Kelurahan Kalibaru tercatat memiliki 711 KPM, yang merupakan salah satu jumlah tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya di Kecamatan Medan Satria. Tingginya jumlah KPM tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Kalibaru memiliki tingkat kebutuhan terhadap program perlindungan sosial yang relatif besar.

Tingginya jumlah KPM di Kelurahan Kalibaru menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang relatif tinggi. Selain itu, jumlah komponen penerima manfaat seperti anak usia sekolah (SD, SMP, SMA) serta lansia juga cukup dominan. Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk menelaah sejauh mana efektivitas pelaksanaan PKH di tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Kalibaru.

Meskipun PKH telah berjalan lama di wilayah ini, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: Pertama, program harus dipahami dengan benar, karena banyak masyarakat masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PKH. Kedua, tepat sasaran, karena dalam pelaksanaan PKH diperlukan pemeriksaan yang lebih akurat untuk menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan dan terdaftar sebagai Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) ada KPM yang memenuhi kriteria tetapi tidak mendaftar, dan ada warga yang sudah mampu atau tidak memenuhi kriteria tetapi tetap terdaftar sebagai peserta PKH. Ketiga, masalah tepat waktu yang berkaitan dengan penyaluran dana, diperlukan waktu untuk memastikan penyaluran dana tepat dan cepat kepada Keluarga Menerima Manfaat (KPM).

Dari permasalahan diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dengan mengambil tema atau judul penelitiannya adalah Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan kajian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari program PKH.
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan PKH.

1.4 Signifikan Penelitian

Signifikasi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikasi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikasi akademik dan signifikasi praktis. Antara lain:

1.4.1 Signifikan Akademik

Berdasarkan pengamatan dan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil peneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut adalah

Tabel 1.4 Beberapa Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Keterangan
1.	Ratna Sugiyana, Dadan Kurniansyah, Mochamad Faizal Rizki. (2022)	Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Rengasdengklok	Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk kehidupan sosial yang layak. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan ini belum berjalan dengan efektif dimana masih ditemukannya kendala dalam proses pelaksanaannya.
2.	Sri Sutjiatmi, Farida Umaroh (2019)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal	Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

			Pelaksanaan pemutakhiran data KPM, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi komitmen fasilitas pendidikan (fasdik), fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan sosial.
3.	Domri Domri, Ridwan Ridwan, Mulia Jaya (2019)	Evektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana PKH membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin.
4.	Rahmah Muin, Rosdiana (2020)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar	Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan mengangkat fenomena ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, atau gambaran mengenai situasi, kondisi, ataupun fenomena tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima bantuan di Desa Laliko, dapat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat namun demikian PKH ini belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif dalam hal penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dilihat dari indikator perubahan nyata yang dialami masyarakat.
5.	Nurul Najidah, Dra.	Efektivitas Program Keluarga	Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program

	Hesti Lestari, MS (2019)	Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rowosari Tembalang Kecamatan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, ketepatan biaya dalam Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya efektif, karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam ketepatan berpikir sudah beroperasi dengan baik.
6.	Nuraida (2019)	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang	Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten subang belum efektif sesuai dengan teori pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memahami hak dan kewajibannya serta belum semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sosialisasi yang dilakukan Pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat belum maksimal.
7.	Alan Hidayat (2018)	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu	Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan diharapkan bisa selalu membaik setiap saatnya karena PKH merupakan program yang mampu mengurangi dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Hasil penelitian pada aspek pemahaman program telah efektif hal ini didasarkan bahwa para KPM telah paham dan mengerti dengan baik apa saja yang dijelaskan oleh para pendamping tentang PKH sehingga dalam menjalankan komitmen serta kewajibannya dibidang pendidikan dan

			kesehatan bisa semaksimal mungkin. Sementara pada aspek tepat sasaran telah efektif hal ini didasarkan pada PKH Kota Bekasi telah menggunakan data yang akurat dan valid dalam memberikan bantuan dan memilih masyarakat yang tepat sesuai kriteria untuk menjadi KPM. Dan yang terakhir pada aspek tepat waktu juga telah efektif hal ini berdasarkan proses penyaluran dana PKH sudah baik dan terstruktur serta telah sesuai waktu yang ditentukan kepada KPM.
8.	Norsanti, Wiwin Safitri (2019)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hauwai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk memberikan bantuan nontunai kepada rumah tangga miskin berupa bantuan pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hauwai cukup efektif membantu masyarakat yang sangat miskin dan rentan khususnya dalam mengakses pendidikan dan kesehatan.

berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, maka keterbaruan penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.4.2 Signifikan Praktis

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi yaitu melakukan penelitian. Dalam program studi Ilmu Pemerintahan penelitian ini membuahkan hasil memberi manfaat serta memberikan gambaran dalam pengetahuan baru melalui penelitian yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi di harapkan penelitian ini bahwa hasil penelitian

dapat berguna serta menambah wawasan masyarakat dalam pemahaman tentang hak sebagai warga Negara dan peduli terhadap kehidupan di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas serta sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi gambaran umum yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terbagi dalam 2 hal yaitu signifikansi makademik dan praktis (signifikansi akademik berisi menguraikan tentang penelitian yang terdahulu, sedang). Serta yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab dua ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori dalam judul penelitian ini. Dan peneliti bab ini juga menguraikan kerangka berfikir, dan asumsi peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, Teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada di bab 1.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dan saran baik secara akademik maupun secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang judul-judul buku, jurnal, alamat website dan produk hukum yang digunakan sebagai referensi dalam skripsi ini.